



LKIP.2020

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

KAB. SERAM BAGIAN BARAT





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan LKIP ini merupakan salah satu bentuk/ media pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2020.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan diterima serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, Amin.

Piru 27 Januari 2021


MUHAMAD JASAN TUTUPOHO, ST, MT
NIP. 19670827 199903 1 006

CS Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Dinas
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Seram Bagian Barat
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas, Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat periode Tahun 2017-2022. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat selama Tahun Anggaran 2020;
- 2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020;
- 3) Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;



- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- 1) Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Perangkat Daerah diatur Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 2) Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat adalah : “Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - b. Melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah pada urusan pemerintah wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

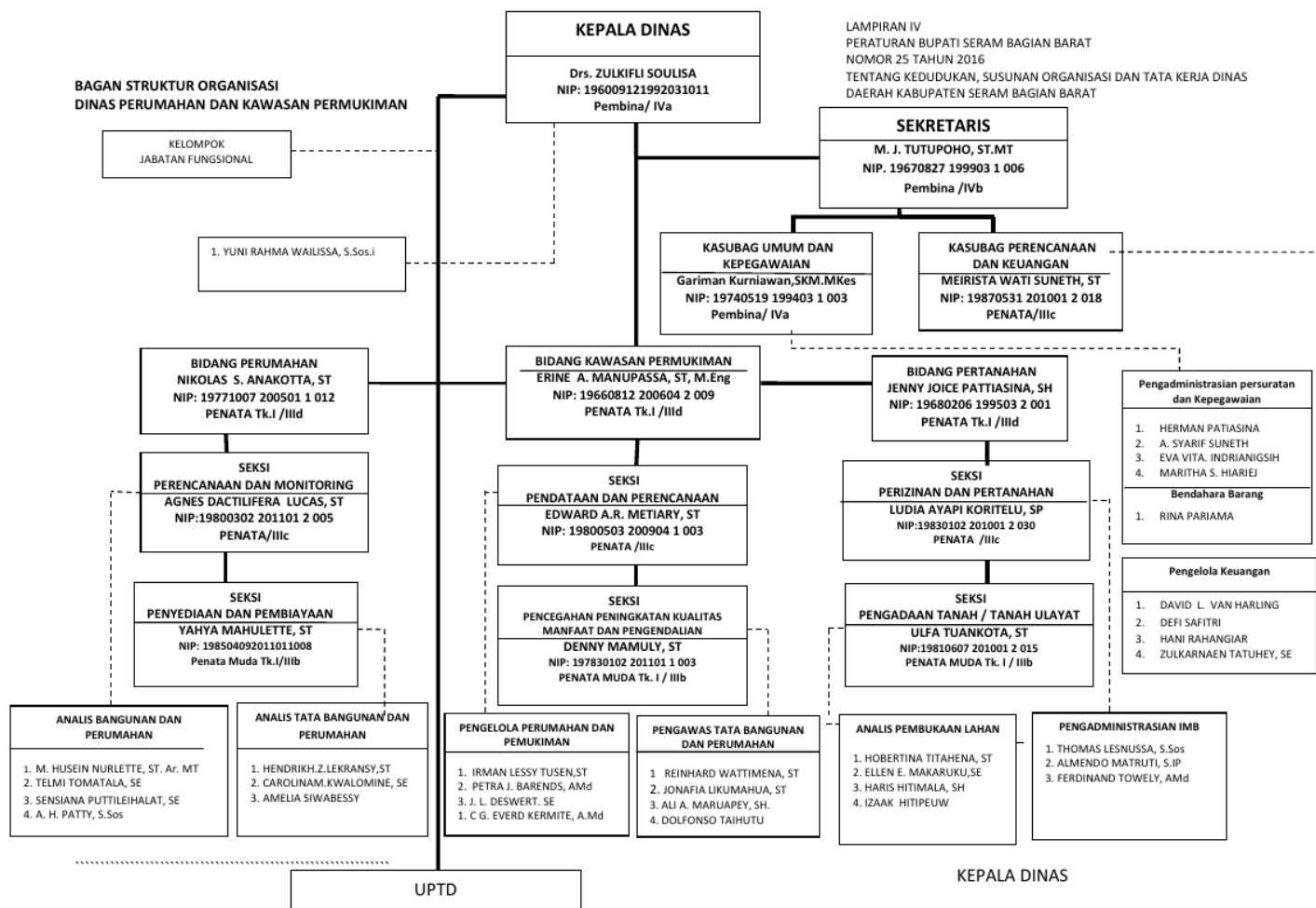
- a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan perumahan, kawasan permukiman yang meliputi Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertata dengan baik;



- c. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan ijin;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Susunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretaris, Membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
 - 3) Bidang Perumahan, Membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi
 - b) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
 - 4. Bidang Kawasan Permukiman Membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pendataan;
 - b) Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Manfaat dan Pengendalian
 - 5. Bidang Pertanahan, Membawahi:
 - a) Seksi Perizinan Dan Pertanahan;
 - b) Seksi Pengadaan Tanah/ Tanah Ulayat;



STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



4) Personil/Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	8
4.	Jabatan Fungsional	16
5.	Non PNS	19
	TOTAL KESELURUHAN	48

Tabel 1.2

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	PANGKAT/ GOL	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat II (IIb)							
	Pengatur (IIc)			4				4
	Pengatur Tingkat (IId)			1				1
3.	Penata Muda (IIIa)					3		3
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					5		5



	Penata (IIIc)					7		7
	Penata Tingkat (IIId)					2	1	3
4.	Pembina Muda (IVa)					1	1	2
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama Madya (IVe)							

Sumber Data :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Seram Bagian Barat

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 TERDIRI DARI 4 (EMPAT) BAB YAITU SEBAGAI BERIKUT:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematiika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022; Analisis



keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat 2020 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2017 – 2021 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun



sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan perumahan yang layak huni
2. Mengurangi permukiman kumuh perkotaan
3. Meningkatkan penyelesaian tata kelola pertanahan



B. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Kesekretariatan	Jumlah Aparatur dan Aset Yang Tertangani	100 %
2.	Tersedianya Tempat tinggal yang Layak Huni bagi Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni	297 Unit
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur	Presentase Penataan Kawasan Permukiman	62,40 %
		Cakupan Pelayanan Air Minum	88 %

NO	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	479.325.100,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Rp.	346.180.000,00	APBD
3.	Pengembangan Perumahan	Rp.	6.188.981.800,00	APBD
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	Rp.	915.383.000,00	APBD
5.	Program Penataan Kawasan Permukiman	Rp.	724.228.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Rp.	780.675.800	APBD
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	152.580.000	APBD
	Jumlah	Rp	9.587.353.700,00	APBD



SASARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terciptanya Birokrasi Pemerintah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Melalui Kinerja Kesekretariatan	√	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Infentaris Kantor Laporan (Lakip), (LPPD), (Renja) dan (Renstra) dan Aparatur Dinas PKP	100 %
		√	Terlaksananya Rencana Penyelenggaraan Pemenuhan Kinerja Bidang Kesekretariatan	100 %
2.	Tersedianya Tempat Tinggal Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	√	Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan Pembangunan Hunian Yang Layak Pada Tahun Berkenaan	297 Unit
		√	Presentasi Pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Kegiatan BSPS.	100 %
		√	Tersedianya Rencana Pengembangan Kinerja Bidang Perumahan	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur	√	Presentase Penataan Kawasan Permukiman	100% (640 Meter)
		√	Terlaksananya Pemenuhan Pembangunan Areal Permukiman Perkotaan yang Belum Tertata	551 Meter
		√	Terlaksananya Rencana Pengembangan Peningkatan Bidang Kawasan Permukiman	Update Data Base 5 Kecamatan
		√	Cakupan Pelayanan Air Minum	1 Paket
		√	Terlaksananya Pengelolaan Sanitasi	1 Paket



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS I

Terciptanya Birokrasi Pemerintah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Melalui Kinerja Kesekretariatan Dapat Mencapai Hasil Yang Memuaskan Didukung Oleh Beberapa Faktor Antara Lain :

- 1) Peran Dinas masyarakat dalam membantu pelaksanaan program
- 2) Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program
- 3) Koordinasi intensif yang dilakukan antar bidang mempermudah pelaksanaan.
- 4) Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Kurangnya Pendataan dan Pelaporan Hasil Kegiatan
- 2) Kurangnya Koordinasi Pihak Pihak terkait.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kerja antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif.
- 2) Mencari solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang terjadi.



3) Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Tabel 3.1.1

Capaian Sasaran Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Infentaris Kantor, Laporan Dan Aparatur Dinas DPKP	1 Paket	100%	100%
Terlaksananya Rencana Penyelenggaraan Pemenuhan Kinerja Bidang Kesektarian	1 Paket	100%	100%

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2018-2019

INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Infentaris Kantor, Laporan Dan Aparatur Dinas DPKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Rencana Penyelenggaraan Pemenuhan Kinerja Bidang Kesektarian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.1.3

Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 Dengan Target Restra SKPD Tahun 2017-2019

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	TARGET 2020
Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Infentaris Kantor, Laporan Dan Aparatur Dinas DPKP	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Rencana Penyelenggaraan Pemenuhan Kinerja Bidang Kesektarian	100%	100%	100%	100%



Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 Dengan Target Nasional Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET NASIONAL
Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Infentaris Kantor, Laporan Dan Aparatur Dinas DPKP	100%	
Terlaksananya Rencana Penyelenggaraan Pemenuhan Kinerja Bidang Kesekretariatan	100%	

Sasaran StrategisTerciptanya Birokrasi Pemerintah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Melalui Kinerja Kesekretariatan Dapat Mencapai Hasil Yang Memuaskan Didukung Oleh Beberapa Faktor Antara Lain :

- 1) Peran Dinas masyarakat dalam membantu pelaksanaan program
- 2) Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program
- 3) Koordinasi intensif yang dilakukan antar bidang mempermudah pelaksanaan.
- 4) Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Kurangnya Pendataan dan Pelaporan Hasil Kegiatan
- 2) Kurangnya Koordinasi Pihak Pihak terkait.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kerja antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif.
- 2) Mencari solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang terjadi.
- 3) Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.



Tabel 3.1.5

Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	479.325.100	466.220.370	97,27
~	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.720.000	5.716.000	97,27
~	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15.660.000	12.725.520	81,26
~	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.670.000	62.074.000	95,99
~	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.705.000	3.489.600	94,19
~	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.395.100	14.197.750	98,63
~	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.531.400	96,88
~	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			
~	Penyediaan Makanan Dan Minuman	3.050.000	3.050.000	100,00
~	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	20.350.000	15.816.100	77,22
~	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	114.775.000	114.620.000	99,86
~	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Dan Sopir	222.000.000	220.000.000	99,10
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	346.180.000	329.136.000	95,07
~	Pembangunan Gedung Kantor	261.180.000	260.831.000	99,87
~	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.000.000	63.305.000	79,13
~	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
TOTAL		825.505.100,00	795.356.370,00	96,34

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Sasaran ini dapat terwujud melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dana yang



dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 479.325.100; dan yang terealisasi sebesar Rp. 466.220.370; atau dana yang terserap sebesar (97,27 %). Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program ini adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Rp. 5.720.000; dana yang terserap sebesar Rp. 5.716.000; atau terealisasi (97,27 %). Dana tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya selama 12 Bulan atau 1 tahun.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Rp 15.660.000; dana yang terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 12.725.520; atau (81,26 %). Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja listrik, biaya penambahan daya, TV Kabel, biaya jasa pemasangan wifi dan biaya beban wifi daya selama 12 bulan atau 1 tahun anggaran.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Rp 64.670.000; dana yang terserap sebesar Rp. 62.074.000; atau terealisasi 95,99 %). Dana tersebut dianggarkan untuk belanja honorarium pengguna anggaran, honorarium pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, pengurus barang dan 1 orang pembantu bendahara selama 12 bulan atau 1 tahun anggaran.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, di anggarkan sebesar Rp. 3.705.000; dana yang terserap sebesar Rp. 3.489.600; atau terealisasi (94,19 %). Dana tersebut digunakan untuk penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun anggaran.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Rp14.395.100; dana yang terserap sebesar Rp. 14.197.750; atau terealisasi (98,63 %). Dana tersebut digunakan untuk penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Rp. 15.000.000; dana yang terserap sebesar Rp. 14.531.400; atau terealisasi (96,88 %). Dana tersebut digunakan untuk biaya cetak (spanduk/baleho), penggandaan (fotocopy) selama 1 tahun anggaran.



- Penyediaan Makanan dan Minuman, Rp. 3.050.000; dana yang terserap sebesar Rp. 3.050.000 atau terealisasi (100,00 %). Dana tersebut digunakan untuk makan minum harian dan makan dan minum rapat aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 1 tahun anggaran.
- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, Rp. 20.350.000; dana yang terserap sebesar Rp. 15.816.100 atau terealisasi (77,22 %). Dana tersebut digunakan untuk biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di pusat.
- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Rp. 114.775.000; dana yang terserap sebesar Rp. 114.620.000 atau terealisasi (99,86 %). Dana tersebut digunakan untuk biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Beberapa Kecamatan yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat.
- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis dan Sopir, Rp. 222.000.000; dana yang terserap sebesar Rp. 220.000.000 atau terealisasi (99,10 %). Dana tersebut digunakan untuk honorarium 18 tenaga honorer selama 1 tahun anggaran.

Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur. Sasaran ini dapat terwujud melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 346.180.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 329.136.000 atau dana yang terserap sebesar (95,07 %). Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program ini adalah :

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Rp. 80.000.000; dana yang terserap sebesar Rp. 63.305.000 atau terealisasi 79.26 %. Dana tersebut digunakan Belanja Jasa Service dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Selama 1 Tahun Anggaran.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor, Rp. 5.000.000; dana yang terserap sebesar Rp. 5.000.000 atau terealisasi (100,00 %). Dana tersebut



digunakan Perawatan AC, Perawatan PC dan Laptop dan perawatan printer Selama 1 Tahun Anggaran.

- Pembangunan Gedung Kantor, Rp. 261.180.000; dana yang terserap sebesar Rp. 260.831.000 atau terealisasi (99,87 %). Dana tersebut digunakan untuk biaya Pembangunan Carport Dan Pagar Kantor. Kab. Seram Bagian Barat.

Sasaran Strategis Ini Dapat Berhasil Dikarenakan Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur, Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Meningkatnya Disiplin Aparatur terlaksana dengan baik.

SASARAN STRATEGIS II

Tersedianya Tempat Tinggal Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Didukung Oleh Beberapa Faktor Antara Lain : Peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan program perumahan Rumah Layak Huni

- 1) Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program bantuan perumahan Rumah Layak Huni
- 2) Koordinasi intensif yang dilakukan dengan stakeholder mempermudah pelaksanaan.
- 3) Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material.
- 2) Kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan.
- 3) Masih banyak yang menjunjung tinggi budaya daerah perihal menentukan hari baik dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kerja antara lain :

- 1) Selalu me-reschedule kembali pekerjaan yang tertunda dikarenakan faktor-faktor yang terjadi diluar perencanaan.



- 2) Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif mengenai perkembangan dilapangan.
- 3) Mencari solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang terjadi dilapangan.
- 4) Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan penuh tanggung jawab.

Tabel 3.2.1

Capaian Sasaran Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio Rumah Layak Huni	162 Unit	297Unit	183%

Tabel 3.2.2

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2018-2019

INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan Pembangunan Hunian Yang Layak Pada Tahun Berkenaan	125 Unit	100%	167 Unit	103%	297 Unit	183%
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kegiatan BPS	100 Unit	100%	167 Unit	100%	297 Unit	183%
Tersedianya rencana Pengembangan Kinerja Bidang Perumahan	Database 11 Kecamatan	100%	Upadte Database 11 Kecamatan	100%	Update Database 5 Kecamatan	100%

Tabel 3.2.3

Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 Dengan Target Restra SKPD Tahun 2017-2019

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2021
Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan	125 Unit	167 Unit	297 Unit	106 Unit



Pembangunan Hunian Yang Layak Pada Tahun Berkenaan				
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kegiatan BSPS	125 Unit	167 Unit	297 Unit	106 Unit
Tersedianya Rencana Pengembangan Kinerja Bidang Perumahan	Database 11 Kecamatan	Update Database 11	Update Database 5 Kecamatan	Update Database 6 Kecamatan

Tabel 3.2.4

Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 Dengan Target Nasional Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET NASIONAL
Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan Pembangunan Hunian Yang Layak Pada Tahun Berkenaan	183%	
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kegiatan BSPS	100%	
Tersedianya rencana Pengembangan Kinerja Bidang Perumahan	100%	

Sasaran Tersedianya Tempat Tinggal Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Didukung Oleh Beberapa Faktor Antara Lain :

- 1) Peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan program perumahan Rumah Layak Huni
- 2) Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program bantuan perumahan Rumah Layak Huni
- 3) Koordinasi intensif yang dilakukan dengan stakeholder mempermudah pelaksanaan.
- 4) Kesiapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material.
- 2) Kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan.



- 3) Masih banyak yang menjunjung tinggi budaya daerah perihal menentukan hari baik dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kerja antara lain :

- 1) Selalu me-reschedule kembali pekerjaan yang tertunda dikarenakan faktor-faktor yang terjadi diluar perencanaan.
- 2) Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif mengenai perkembangan dilapangan.
- 3) Mencari solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang terjadi dilapangan.
- 4) Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan penuh tanggung jawab.

Tabel 3.2.5

Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengembangan Perumahan	6.188.981.800	6.035.374.100	97,52
	Monitoring dan Evaluasi TIM Teknis BSPS (Pendamping DAK)	180.005.800	145.517.500	80,84
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1.203.607.000	1.197.577.000	99,50
	Pendataan dan Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. SBB	51.015.000	50.755.000	99,49
	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP)	618.010.000	590.549.600	95,56
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	4.136.344.000	4.050.975.000	97,94
TOTAL		6.188.981.800	6.035.374.100	97,52

Meningkatnya Pengembangan Perumahan. Sasaran ini dapat terwujud melalui program Peningkatan Pengembangan Perumahan. Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 6.188.981.800; dan yang terealisasi sebesar Rp.



6.035.374.100 atau dana yang terserap sebesar (97,52 %). Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program ini :

- Monitoring dan Evaluasi TIM Teknis BSPS (Pendamping DAK), Rp. 180.005.800; dana yang terserap sebesar Rp. 145.517.500 atau terealisasi (80,84%). Dana tersebut untuk 1 tahun Anggaran.
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Rp. 1.203.607.000 dana yang terserap sebesar Rp. 1.197.577.000 atau terealisasi (99,50 %). Dana tersebut untuk 1 tahun Anggaran.
- Pendataan dan Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. SBB Rp. 51.015.000 dana yang terserap sebesar Rp. 50.755.000 atau terealisasi (99,49 %). Dana tersebut untuk 1 tahun Anggaran.
- Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Rp. 618.010.000 dana yang terserap sebesar Rp. 590.549.600 atau terealisasi (95,56 %). Dana tersebut untuk Belanja Pembuatan Dokumen RP3KP.
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK) Rp. 4.136.344.000 dana yang terserap sebesar Rp. 4.050.975.000 atau terealisasi (97,94 %). Dana tersebut untuk Belanja Bahan Bangunan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Sasaran Strategis Ini Dapat Berhasil Dikarenakan Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Perumahan Terlaksana Dengan Baik.

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya Lingkungan Sehat Kawasan Permukiman Didukung Oleh Beberapa Faktor Antara Lain :

- 1) Inovasi percepatan dalam melaksanakan kegiatan dari seluruh pegawai dilingkungan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman
- 2) Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas
- 3) Memaksimalkan tenaga, sarana dan prasarana yang tersedia.



Namun dalam pelaksanaan ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan Lingkungan Sehat
- 2) Keterpaduan koordinasi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi belum tercapai.
- 3) Prasarana dan sarana kerja yang kurang memadai.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kerja antara lain :

- 1) Menyusun petunjuk dan prosedur dalam melaksanakan tugas
- 2) Meningkatkan kemampuan individu agar dapat mencapai target kerja yang terus meningkat
- 3) Melakukan inventarisasi data yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, baik dengan cara koordinasi dengan pihak terkait maupun dengan jasa konsultasi
- 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait dalam upaya meningkatkan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 5) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pengadaan sarana yang dapat menunjang kinerja
- 6) Melaksanakan kegiatan lingkungan Sehat Kawasan Permukiman.

Tabel 3.3.1

Capaian Sasaran Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terlaksananya Pemenuhan pembangunan lingkungan Kawasan permukiman yang belum tertata	600 Meter	640 Meter	106%
Terlaksananya pemenuhan pembangunan areal permukiman perkotaan yang belum tertata	500 Meter	551 Meter	110,2%
Terlaksananya Rencana Pengembangan Peningkatan Bidang Kawasan Permukiman	Data Base 5 Kecamatan	Data Base 5 Kecamatan	100%



Tabel 3.3.2

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2018-2019

INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Terlaksananya Pemenuhan pembangunan lingkungan Kawasan pemukiman yang belum tertata	838 Meter	100%	1593 Meter	210%	640 Meter	106%
Terlaksananya pemenuhan pembangunan areal pemukiman perkotaan yang belum tertata	838 Meter	100%	1000 Meter	132%	551 Meter	110,2%
Terlaksananya Rencana Pengembangan Peningkatan Bidang Kawasan Permukiman	Database 11 Kecamatan	100%	Update Database 11 Kecamatan	100%	Update Database 5 Kecamatan	100%

Tabel 3.3.3

Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 Dengan Target Restra SKPD Tahun 2017-2019

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2021
Terlaksananya Pemenuhan pembangunan lingkungan Kawasan pemukiman yang belum tertata	838 Meter	1593 Meter	640 Meter	1050 Meter
Terlaksananya pemenuhan pembangunan areal pemukiman perkotaan yang belum tertata	838 Meter	1000 Meter	551 Meter	769 Meter
Terlaksananya Rencana Pengembangan Peningkatan Bidang Kawasan Permukiman	Database 11 Kecamatan	Update Database 11 Kecamatan	Update Database 5 Kecamatan	Update Database 4 Kecamatan



Tabel 3.3.4

Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 Dengan Target Nasional Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET NASIONAL
Terlaksananya Pemenuhan pembangunan lingkungan Kawasan pemukiman yang belum tertata	640 Meter	
Terlaksananya pemenuhan pembangunan areal pemukiman perkotaan yang belum tertata	551 Meter	
Terlaksananya Rencana Pengembangan Peningkatan Bidang Kawasan Permukiman	Update Database 5 Kecamatan	

Penataan Areal Pertamanan Dan Areal Publik Didukung Oleh Beberapa Faktor Antara Lain :

- 1) Inovasi percepatan dalam melaksanakan kegiatan dari seluruh pegawai dilingkungan bidang Pertamanan
- 2) Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas
- 3) Memaksimalkan tenaga, sarana dan prasarana yang tersedia.

Namun dalam pelaksanaan ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan Penataan Areal Pertamanan Dan Areal Publik
- 2) Keterpaduan koordinasi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi belum tercapai.
- 3) Prasarana dan sarana kerja yang kurang memadai.

Adapun upaya yang dilakukan dalam dalam rangka meningkatkan capaian kerja antara lain :

- 1) Menyusun petunjuk dan prosedur dalam melaksanakan tugas
- 2) Meningkatkan kemampuan individu agar dapat mencapai target kerja yang terus meningkat
- 3) Melakukan inventarisasi data yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, baik dengan cara koordinasi dengan pihak terkait maupun dengan jasa konsultasi
- 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait dalam upaya meningkatkan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.



- 5) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pengadaan sarana yang dapat menunjang kinerja
- 6) Melaksanakan kegiatan Penataan Areal Pertamanan Dan Areal Publik Didukung

Tabel 3.3.5

Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum	915.383.000	877.973.060	95.91
	Pembangunan Prasarana Sarana Desa	915.383.000	877.973.060	95.91
	Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum RUSUNAWA	0	0	00,00
TOTAL		915.383.000	877.973.060	95.91

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum. Sasaran ini dapat terwujud melalui program Pembangunan jalan lingkungan pedesaan dan Pembangunan Jembatan Desa. Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 915.383.000; dan yang terealisasi sebesar Rp. 877.973.060 atau dana yang terserap sebesar (95.91%). Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program ini adalah:

- Pembangunan Prasarana Sarana Desa Rp. 915.383.000; dana yang terserap sebesar Rp. 877.973.060 atau terealisasi (95.91%). Dana tersebut digunakan untuk Membayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jasa Desa selama 1 Tahun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. SBB.



Sasaran Strategis Ini Dapat Berhasil Dikarenakan Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, Terlaksana Dengan Baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penataan Kawasan Permukiman	724.228.000	722.141.000	99,71
	Inventarisasi Data Jalan Lingkungan Permukiman Kab. SBB	66.865.000	65.865.000	99,84
	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pedesaan	657.363.000	656.276.000	99,68
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Limbah	152.580.000	152.135.000	99,71
	Pembangunan Air Bersih	152.580.000	152.135.000	99,71
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	780.675.800	731.553.000	93,71
	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air dan Drainase	780.675.800	731.553.000	93,71
TOTAL		1.657.483.800	1.605.829.000	97,71

Meningkatnya Penataan Penataan Kawasan Permukiman. Sasaran ini dapat terwujud melalui program Inventarisasi Data Jalan Lingkungan Permukiman Kab. SBB. Dana yang di anggarkan untuk program ini sebesar Rp. 66.865.000; dan yang terealisasi sebesar Rp. 65.865.000 atau dana yang terserap sebesar (99,84%). Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program ini adalah:

- Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pedesaan Rp. 657.363.000; dana yang terserap sebesar Rp. 656.276.000 atau terealisasi (99,68%). Dana tersebut digunakan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa, selama 1 Tahun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. SBB.



Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah. Sasaran ini dapat terwujud melalui Program Pembangunan Air Bersih. Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 152.580.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 152.135.000 atau dana yang terserap (99,71%). Dana di gunakan untuk Pembangunan Air Bersih Dusun Hanunu.

Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi. Sasaran ini dapat terwujud melalui Program Pembangunan Dan Perbaikan Saluran Air Bersih Dan Drainase . Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 780.675.800 dan yang terealisasi sebesar Rp. 731.553.000 atau dana yang terserap (93,71%). Dana di gunakan untuk Pembangunan Dan Perbaikan Saluran Air Bersih Dan Drainase Kab Seram Bagian Barat Tersebar..

Sasaran Strategis Ini Dapat Berhasil Dikarenakan Kegiatan Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman, Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Limbah dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi, Terlaksana Dengan Baik.



BAB IV

PENUTUP

A. MASALAH UMUM YANG DIHADAPI

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat 2017-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dinyatakan berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020. Jumlah tersebut telah direalisasikan.

B. SARAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA PERIODE MENDATANG

- 1) Perlunya SDM yang memadai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat.
- 2) Perlunya Batasan Batasan Area kegiatan yang menjadi acuan terkait kegiatan antara SKPD/ OPD Sehingga tidak terjadinya adanya tumpang tindih dalam melaksanakan kegiatan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Perumahan
- 3) Perlunya Kepedulian Masyarakat Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kegiatan ini



C. KESIMPULAN

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

